

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan. Hal ini dikarenakan di dalam laporan keuangan mengandung informasi keuangan perusahaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) Nomor 1, dikatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor, kreditur dan pengguna lain dalam pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain yang sejenis, yang rasional. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Salah satu informasi yang paling penting ditunggu pihak yang berkepentingan adalah laba. Laba merupakan salah satu indikator yang menilai keberhasilan atau kinerja perusahaan di mana laba tersebut diukur dengan dasar akrual. Akan tetapi ada fleksibilitas dari implementasi Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (*General Accepted Accounting Principles*) yang menyebabkan manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan yang ada, sehingga pada akhirnya

memungkinkan dilakukan manajemen laba (*earning management*) oleh perusahaan (Subramanyam, 1996).

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan manajer dengan merekayasa laba perusahaan menjadi lebih tinggi, rendah, atau selalu sama selama beberapa periode. Manajemen laba terjadi karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak, hal ini berkaitan dengan teori agensi. Teori agensi menyatakan bahwa semua pihak bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pemegang saham sebagai prinsipel diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangannya yang bertambah atau investasi mereka bertambah. Para agen (dalam hal ini manajer perusahaan) diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan apabila perusahaan mempunyai kinerja keuangan yang baik. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memaksimalkan kepentingannya.

Prinsipel menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan agen menginginkan kepentingannya di akomodasi dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipel menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperoleh laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba, harga saham dan semakin besar dividen yang diberikan, maka agen dianggap berkinerja dengan baik sehingga layak mendapatkan insentif yang tinggi.

Sebaliknya agen pun memenuhi tuntutan principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi apabila kinerjanya yang salah satu pengukuran dengan

menggunakan laba tinggi. Apabila tidak ada pengawasan yang memadai maka agensi dapat memainkan peranannya seolah-olah target tercapai sehingga munculnya istilah *creative accounting*. Salah satu tindakan yang dilakukan dengan adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan artinya piutang tersebut tidak dapat ditagih seharusnya dihapuskan tetapi agen masih tetap menampilkan pada neraca perusahaan sehingga seolah-olah piutang perusahaan tinggi dan di masa depan perusahaan akan memperoleh pendapatan yang besar dan menarik perhatian investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya diperusahaan, kapitalisasi beban yang tidak semestinya, pengakuan penjualan yang tidak semestinya yang berdampak terhadap pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang akan membuat laporan keuangan terlihat sangat baik walaupun tidak. Melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun perusahaan terlihat mengalami keuntungan meskipun kenyataannya merugi.

Tindakan manajemen laba (*earning management*) telah menyebabkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang di kenal antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika serikat (Cornett *et al.* 2006). Enron Corporation terbukti melakukan manipulasi laba yaitu dengan bekerja sama dengan kantor akuntan publik Arthur Anderson untuk mendongkrak laba mendekati USD1 Miliar yang sesungguhnya tidak ada. Begitu juga dengan Xerox Corporation yang menipu pendapatan sebesar USD 6 Miliar. Di Indonesia pun hal yang serupa terjadi seperti kasus PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk yang berawal dari deteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Contoh tindakan manajemen laba yang merugikan di Indonesia adalah kasus PT.Kimia Farma Tbk. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 miliar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 miliar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Informasi tersebut dapat menyesatkan pihak investor dan kreditur juga pemerintah di dalam membuat keputusan, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memperoleh laba yang tinggi. Kasus lain, pada tahun 2018 terungkap bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) melakukan kesalahan terkait penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2018. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa laporan keuangan PT. Garuda Indonesia belum sesuai dengan standar akuntansi. Diketahuidalam laporan keuangan 2018, PT. Garuda Indonesia mencatat laba bersih sebesar US\$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Laba tersebut ditopang salah satunya kerjasama antara garuda dengan PT. Maharata Aero Teknologi senilai US\$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 triliun. Dana tersebut masih bersifat piutang tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Sehingga perusahaan yang sebelumnya rugi menjadi laba. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) dan Otoritas Jasa Keuagan (OJK) memutuskan bahwa ada salah saji laporan keuangan dan PT. Garuda Indonesia terkena sanksi atas kasus ini
